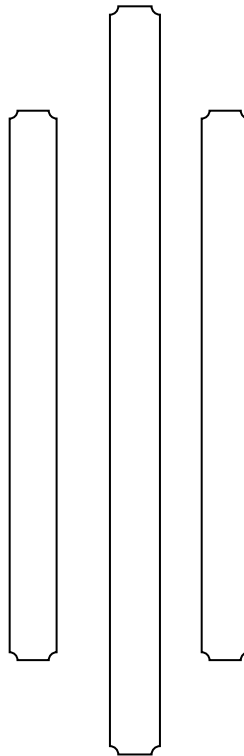




**PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DPRD  
KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
(RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2029**



Disampaikan pada  
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang  
Tanggal 10 Juli 2025

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Selamat siang dan salam sejahtera,**

Yang terhormat,

Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang ;

Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Malang ;

Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Malang beserta staf,

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Dzat yang maha suci lagi kuasa, Tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah, sehingga kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para penerus ajarannya, mudah-mudahan dengan petunjuk dan bimbingan-Nya, kita mendapat kekuatan dalam melaksanakan pengabdian kepada Negeri yang kita cintai ini.

**Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,**

Pertama-tama kami sampaikan bahwa dasar dari pelaksanaan tahapan penyusunan, pembahasan, penetapan dan evaluasi dari RPJMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk Menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Malang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh *stakeholder* untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Malang 2025-2029.

Dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Indikator Utama Pembangunan dan Indikator Kinerja Daerah sebagai bentuk kontribusi

terhadap tujuan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Regional Jawa Timur.

Beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam pembahasan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, antara lain :

1. Peran strategis Daerah dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, antara lain :

- a. Kabupaten Malang sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru (KSPN – BTS)
- b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari

2. Potensi Pengembangan Infrastruktur Malang yaitu :

a. Bandar Udara

Bandar Udara Abdulrachman Saleh berlokasi di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang ini berjarak 17 km ke arah timur dari Kota Malang. Bandara ini menjadi salah satu fokus pembangunan prasarana transportasi, dengan rencana peningkatan pada jalan akses, kapasitas, maskapai, dan jumlah penerbangan. Bandar Udara Abdulrachman Saleh, direncanakan menjadi bandara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder atau terbesar kedua di Jawa Timur. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Bandar Udara Abdulrachman Saleh berkembang dan dalam proses peningkatan kelas bandara menjadi bandar udara internasional

b. Jaringan jalan

- Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi ruas jalan pendukung aktivitas pariwisata kreatif (pariwisata dan industri kreatif) berbasis komunitas dan budaya lokal serta pendongkrak potensi unggulan daerah;
- Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan yang dimulai dengan Jalan Lintas Selatan (JLS) beserta jalan siripnya. Jalan sirip dimaksud sebagai akses koridor menuju Jalan Lintas Selatan, dengan koridor barat di ruas Kepanjen-Pagak, koridor tengah di ruas Gondanglegi-Simpang Balekambang, dan koridor timur di Kabupaten Malang hingga saat ini masih belum merata dalam pembangunan infrastrukturnya, dengan wilayah utara yang lebih maju dari wilayah selatan. Oleh karena

itu kegiatan peningkatan jalan ini dilakukan percepatan untuk wilayah selatan Kabupaten Malang;

- Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 367 Tahun 2023 tentang Rencana Jalan Nasional Tahun 2020-2040, Pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen, jalan tol Pandaan-Malang, jalan tol Yogyakarta-Pacitan-Trenggalek-Lumajang, dan jalan tol Sukorejo-Batu-Kediri melanjutkan tol Pandaan-Malang, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur;
- Adanya jalan nasional bukan tol (Jalan Lintas Selatan) dibangun untuk menghubungkan wilayah pesisir Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar di sebelah barat dan Kabupaten Lumajang di sebelah timur. Ruas JLS melintasi kawasan pesisir Kabupaten Malang sepanjang 98,46 km, dengan capaian progres penanganan sepanjang 55,16 km ke arah Kabupaten Blitar, sedangkan sisa penanganan sepanjang 43,30 km ke arah Kabupaten Lumajang.

c. Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan irigasi yang terdapat di Kabupaten Malang sebanyak 737 jaringan irigasi yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ngantang 219 jaringan, UPT Singosari 87 jaringan, UPT Tumpang 84 jaringan, UPT Turen 115 jaringan, UPT Gondanglegi 35 jaringan, UPT Kepanjen 58 jaringan, UPT Ngajum 139 jaringan.

d. Tempat Pemrosesan Akhir

Adanya sarana dan prasarana untuk pengolahan sampah bertujuan untuk menghemat energi, mengurangi polusi, menghemat Sumber Daya Alam, serta menghemat biaya pengeluaran. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Malang berada di 3 (tiga) lokasi menggunakan sistem gali urug terkendali (*controlled landfill*), dan perlahan lahan dikembangkan untuk memenuhi standar *sanitary landfill*, yaitu TPA Talangagung di Kecamatan Kepanjen dengan luas 10,70 hektar, TPA Paras di Kecamatan Poncokusumo dengan luas 4,47 hektar, dan TPA Randuagung di Singosari

dengan luas 8,76 hektar. Hanya TPA Talangagung yang memiliki jembatan timbang, sementara dua lainnya masih memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan

**Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,**

3. Potensi Pengembangan Sumber Daya Alam

- a. Potensi Pengembangan Pertanian.
- b. Potensi Pengembangan Peternakan.
- c. Potensi Pengembangan Perikanan.
- d. Potensi Pengembangan Pariwisata.

4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Air

Hasil analisis menunjukkan ketersediaan air yang paling tinggi di Kabupaten Malang terdapat di Kecamatan Pakis sebanyak 1 milyar 577 juta 984 ribu 297 meter kubik pertahun per hektar. Sedangkan wilayah yang memiliki ketersediaan paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain adalah di Kecamatan Tajinan sebanyak 86 juta 259 ribu 87 meter kubik per tahun per hektar. Ketersediaan air dimana diharapkan mampu mencukupi tingkat kebutuhan air yang dibutuhkan dalam wilayah tersebut baik untuk kebutuhan kegiatan domestik maupun non domestik.

b. Daya Dukung Pangan

Secara keseluruhan, Kabupaten Malang memiliki nilai rata-rata daya dukung pangan sebesar 1,49 pada tahun 2024 dan pada tahun 2029 sebesar 1,51. Meskipun masih berada pada status “Belum terlampaui”. Penurunan nilai daya dukung ini menunjukkan adanya potensi penurunan kapasitas pangan di masa depan. Dengan demikian, jika tidak ada intervensi yang memadai, Kabupaten Malang akan menghadapi tantangan serius dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, terutama di kecamatan-kecamatan dengan daya dukung yang telah melampaui batas.

5. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan iklim

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana di Indonesia, Kabupaten Malang tahun 2024 memiliki skor kerawanan sebesar 114,33 masuk pada kelas kerawanan sedang dan menduduki kerawanan peringkat 7 level provinsi.

Kabupaten Malang, sebagai salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan, menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana. Salah satu upaya strategis yang telah dilakukan adalah pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai langkah mitigasi berbasis masyarakat, data menunjukkan bahwa pengembangan Destana di Kabupaten Malang masih belum optimal dalam mendukung kesiapsiagaan daerah secara menyeluruh.

6. Aspek Kesejahteraan masyarakat meliputi :

- a. Kesejahteraan Ekonomi
- b. Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Semua
- c. Pendidikan Berkualitas yang Merata
- d. Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan
- e. Masyarakat yang beragama dan Berkebudayaan Maju
- f. Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender

7. Aspek Daya Saing Daerah meliputi :

- a. Daya Saing Sumber Daya Manusia
- b. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Inovasi Dalam Peningkatan Produktivitas Ekonomi
- c. Penerapan Ekonomi Hijau
- d. Transformasi Digital
- e. Penguatan Jaringan Rantai Nilai, Kerjasama Dengan Investor Dalam Dan Luar Negeri
- f. Pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
- g. Stabilitas Ekonomi Makro

8. Aspek Pelayanan Umum meliputi
  - a. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.
  - b. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah
  - c. Daya Saing Iklim Investasi
  - d. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah
9. Standar Pelayanan Minimal, meliputi :
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - f. Sosial

**Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,**

10. Kerjasama Daerah, meliputi
  - a. *Corporate Social Responsibility (CSR)*
  - b. Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
  - c. Kerjasama Antar Daerah (KAD)
  - d. Ekonomi Syariah
11. Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Kabupaten Malang
  - a. Pembangunan Masjid Negara
  - b. Pembangunan Alun-Alun Kabupaten Malang
  - c. Pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen
  - d. Pembangunan Sekolah Unggulan Kabupaten Malang
  - e. Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Malang
  - f. Pembangunan Koperasi Merah Putih Kabupaten Malang
  - g. Revitalisasi Pasar Lawang
  - h. Taman Tematik Bromo Vulcania Park
  - i. Pembangunan Gedung Kesenian

j. *Skytrain* dan Terminal Bus Wisata

12. BUMD yang Mendukung Kinerja Pelayanan Kabupaten Malang

a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan

Kontribusi Perumda Tirta Kanjuruhan terhadap PAD Kabupaten Malang melalui dividen terus mengalami peningkatan hingga 142% dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusi tersebut didukung oleh kinerja keuangan melalui perolehan laba yang meningkat setiap tahun. Perumda Tirta Kanjuruhan juga berperan terhadap peningkatan perekonomian daerah melalui kontribusi nilai tambahnya pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang, kemampuan dalam menyerap tenaga kerja dan perannya dalam menyediakan sumber air perpipaan yang dibutuhkan masyarakat baik dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai.

b. PT BPR Artha Kanjuruhan

Kinerja keuangan PT BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang mulai terpuruk sejak Pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Tingginya tingkat kredit macet pada masa pandemi, mendukung kerugian keuangan yang dialami perusahaan. Pencatatan kerugian terdalam terjadi pada tahun 2023, dimana perusahaan tidak bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat karena kondisi *cash ratio* yang kurang baik. Restrukturisasi manajemen perusahaan dilaksanakan pada akhir tahun 2023, sehingga kerugian berhasil ditekan hingga menyisakan sebesar 990 juta 509 ribu 789 rupiah pada akhir tahun 2024 dari sebelumnya sebesar 4 milyar 223 juta 520 ribu 93 rupiah pada tahun 2023.

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, PT BPR Artha Kanjuruhan Pemerintah Kabupaten Malang (Perseroda) belum mampu menyumbangkan dividen kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, namun berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja masih terus dilakukan hingga saat ini dengan pengawasan normal dari Otoritas Jasa Keuangan.

c. Perumda Jasa Yasa

Sebagai perusahaan dengan jenis kegiatan usaha berupa pengelolaan tempat wisata, Perumda Jasa Yasa mengalami penurunan pendapatan secara signifikan sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial, pengurangan jam kerja, dan kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 lainnya pada akhir tahun 2020 hingga 2021. Upaya Perumda Jasa Yasa dalam melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan unit usaha dibuktikan dengan kontribusi kepada Daerah berupa dividen pada tahun 2024 yang melonjak signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun nilai penyertaan modal daerah tidak terdapat peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir.

d. PT Kigumas

PT Kigumas telah berhenti beroperasi sejak Tahun 2010 akibat kerugian perusahaan. Upaya pencarian investor oleh Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengoperasikan kembali PT Kigumas belum berhasil. Dengan jumlah penyertaan modal daerah sebesar 25 milyar rupiah, PT Kigumas hingga tahun 2024 belum memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk dividen.

Pemerintah Kabupaten Malang selaku Pemegang Saham PT Kigumas, melalui Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/574/KEP/35.07.013/2022 tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat tertanggal 13 September 2022, telah menindaklanjuti kondisi PT Kigumas dengan berbagai upaya penyelesaian, diantaranya:

- 1) Menerbitkan surat Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bapak Bupati Malang tertanggal 4 Januari 2023 Nomor: 032/50/35.07.204/2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Analisis Investasi PT Kigumas, dengan saran dalam penyelesaian permasalahan PT Kigumas salah satunya adalah kebijakan pembubaran PT Kigumas dilakukan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

- 2) Menerbitkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri tertanggal 21 Desember 2023 Nomor: X.700.1.2.4/349/IJ hal Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, salah satu diantaranya menyarankan Bupati Malang selaku KPM menindaklanjuti hasil Analisis Investasi Pemerintah Kabupaten Malang bersama Universitas Brawijaya tanggal 12 Desember 2022 untuk melakukan kebijakan pembubaran PT. Kigumas dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 3) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/27/KPTS/35.07.040/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/5/KPTS/35.07.100/2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat.

**Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,**

13. Gambaran Keuangan Daerah

- a. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- b. Proyeksi Keuangan Daerah

14. Permasalahan Pembangunan Daerah

- a. Belum optimalnya nilai tambah sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah
- b. Belum optimalnya konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah

- c. Belum meratanya pemenuhan kebutuhan pangan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang
- d. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia
- e. Belum optimalnya ketahanan terhadap gangguan sosial budaya, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Kurangnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan kualitas Lingkungan Hidup
- g. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan penerapan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
- h. Tingginya jumlah penduduk miskin serta rendahnya garis kemiskinan

#### 15. Isu Strategis Daerah

- a. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD bertujuan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan. Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Malang merupakan hasil analisis dokumen kebijakan dan masukan public.

- b. Isu Global

Beberapa isu strategis internasional yang dapat mempengaruhi dunia meliputi:

- 1) Geopolitik dan Geo Ekonomi terkait berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Negara-negara Timur Tengah;
- 2) Pelemahan Ekonomi Cina yang berpotensi menurunkan ekspor negara lain ke Cina;
- 3) Dampak perubahan Iklim global dengan adanya peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan sektor lainnya;

- 4) Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat yang meningkatkan tarif impor ke pasar Amerika Serikat berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia

c. Isu Nasional

- 1) Rendahnya Produktivitas
- 2) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat
- 4) Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif
- 5) Krisis Lingkungan
- 6) Geopolitik dan Geoekonomi
- 7) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

d. Isu Regional Jawa Timur

- 1) Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah;
- 2) Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan kemiskinan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan;
- 3) Pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas;
- 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik;
- 5) Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

e. Isu Strategis Daerah Kabupaten Malang

- 1) Pengembangan perekonomian berbasis sumber daya lokal
- 2) Konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah
- 3) Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan,

- 4) Penguatan daya saing sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas
- 5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam.
- 6) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Digitalisasi Pelayanan Publik
- 7) Potensi konflik sosial dan relatif tingginya angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak serta perkawinan anak
- 8) Belum optimalnya pengentasan kemiskinan

16. Potensi Daerah

- a. Sumber Daya Alam yang Melimpah
- b. Pariwisata dan Budaya yang Kuat
- c. Daya Saing SDM Mulai Meningkatkan
- d. Dukungan Infrastruktur yang Berkembang
- e. Digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan layanan public
- f. Stabilitas Sosial dan Keamanan

**Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,**

17. Visi RPJMD Kabupaten Malang tahun 2025-2029 tidak dilakukan koreksi karena merupakan visi dari Calon Bupati Wakil Bupati Malang pada Waktu Pemilihan Kepala Daerah Sertentak tahun 2024, visi tersebut yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”**.
18. Dokumen RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Malang Tahun 2024-2044, KLHS 2025-2029, RIPJPID Tahun 2025-2029.

19. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, bertujuan untuk :
- a. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Malang periode tahun 2025-2029;
  - b. Memberikan landasan dan pedoman pada Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam melaksanakan pembangunan tahun 2025-2029;
  - c. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD;
  - d. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program serta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - e. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
  - f. Memberikan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 – 2029.
20. Misi dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, terdiri dari 5 misi, yaitu:
- a. Misi 1 Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Kualitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.  
Tujuan dari Misi 1, yaitu :
    1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan
    2. Meningkatkan Daya Saing SDM Berkualitas bagi Seluruh Lapisan Masyarakat
  - b. Misi 2 Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Produktif yang Berkelanjutan serta Ramah Lingkungan.  
Tujuan dari Misi 2, yaitu :
    1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Inklusif

2. Meningkatkan Investasi dalam Pembangunan
  - c. Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan dalam Pembangunan berkesinambungan.  
Tujuan dari Misi 3, yaitu :
    1. Meningkatkan Birokrasi Pemerintah Yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel.
  - d. Misi 4 Memantapkan Stabilitas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Ketahanan Sosial Budaya.  
Tujuan dari Misi 4, yaitu :
    1. Terwujudnya masyarakat yang kondusif, toleran dan berbudaya.
  - e. Misi 5 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur yang Merata, Berkeadilan, Berkualitas, Ramah Lingkungan untuk Mewujudkan kesinambungan Pembangunan  
Tujuan Misi 5, yaitu :
    1. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari melalui Infrastruktur Berkelanjutan
    2. Terwujudnya Lingkungan Tangguh Berkelanjutan
21. 5 misi dan 8 tujuan dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 terbagi menjadi 22 sasaran yaitu:
- a. Terwujudnya Perlindungan Sosial yang adaptif dan perluasan lapangan kerja
  - b. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar
  - c. Meningkatnya Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat secara merata
  - d. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata
  - e. Meningkatnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dalam peningkatan produktivitas ekonomi
  - f. Meningkatnya nilai ekonomi pertanian
  - g. Terjaganya stabilitas ekonomi daerah
  - h. Meningkatnya penguatan jaringan rantai nilai, kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri
  - i. Meningkatnya Daya Saing Investasi

- j. Meningkatnya pembangunan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
- k. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi
- l. Terwujudnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas
- m. Terwujudnya digitalisasi administrasi pemerintahan
- n. Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
- o. Meningkatnya Masyarakat yang Berbudaya
- p. Meningkatnya Penanganan Potensi Kasus Konflik Sosial di Masyarakat
- q. Terwujudnya Pembangunan Keluarga dan Kesetaraan Gender
- r. Terwujudnya Lingkungan Hidup Lestari
- s. Tercapainya Peningkatan Pengelolaan sampah
- t. Optimalisasi Konektivitas Antar Wilayah
- u. Terwujudnya Peningkatan Ketangguhan Bencana
- v. Terwujudnya Ketahanan Air

**Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,**

## 22. Pentahapan Pembangunan

Prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah tahun 2025-2029 disusun dalam pentahapan pembangunan, yang terbagi menjadi :

- Tahun 2026 Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
- Tahun 2027 Penguatan Ekonomi melalui Pemantapan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
- Tahun 2028 Penguatan Ekonomi melalui Pemantapan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
- Tahun 2029 Penguatan Ekonomi melalui Pemantapan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
- Tahun 2030 Ekonomi Sosial Mantap dan SDM Unggul

### 23. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk mendukung upaya mewujudkan Kabupaten Malang yang, Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, sehingga program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Program dan pagu indikatif disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan arah pembangunan dan program yang direncanakan dalam RPJMD guna menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan urusan yang diampu Perangkat Daerah.

**Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat,**

Dinamika pembahasan antara Panitia Khusus DPRD dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang yang tidak kalah pentingnya antara lain :

1. Pengembangan pusat permukiman terjadi karena adanya aglomerasi aktivitas perekonomian di Kabupaten Malang, pusat permukiman tersebut perlu dilengkapi dengan membangun sarana ekonomi sosial atau infrastruktur penunjang kegiatan, dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih seimbang, memberikan manfaat bagi seluruh Masyarakat serta mempercepat pemerataan pengembangan wilayah, optimalisasi pelayanan publik dan kebijakan penataan daerah termasuk didalamnya potensi pemekaran dan pengabungan wilayah dengan memperhatikan rentang kendali dan luas wilayah.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik.
3. Pengembangan dan penguatan budaya lokal.
4. Penataan birokrasi terkait dengan perizinan.
5. Penguatan kelembagaan DPRD dalam melaksanakan fungsinya.

6. Potensi yang ada di Kabupaten Malang yang blm tergambarkan secara nyata untuk dapat meningkatkan PAD.
7. Tata Kelola ASN yang masih merupakan otonomi Pemerintah Pusat.
8. Pendidikan yang berbasis agama yang masih belum terlihat dalam program dan kegiatan.
9. Singkronisasi data kependudukan.

Dari dinamika tersebut terdapat hal-hal yang langsung masuk dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 atau nanti akan masuk kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

**Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat;**

Telaah reflektif atas RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Pembangunan pada hakikatnya, adalah upaya memanusiakan manusia membuka akses, memperluas pilihan, dan menegaskan martabat warga sebagai pusat segala kebijakan. RPJMD sebagai kompas pembangunan harus berpijak pada cita-cita luhur, kemajuan tidak sekadar terwujud lewat angka-angka pertumbuhan ekonomi, tetapi terutama pada tercapainya keadilan, kesejahteraan, serta ruang partisipasi yang setara bagi seluruh masyarakat. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025–2029 hadir sebagai dokumen yang tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga menawarkan visi: “Malang Makmur Berkelanjutan”. Visi ini selaras dengan perubahan zaman, di mana setiap warga menuntut layanan yang cepat, transparan, dan adil, serta berhak terlibat dalam proses pembangunan.
2. Tak dapat dipungkiri, penyusunan RPJMD ini telah mengakomodasi perkembangan baru, baik dari aspek integrasi dokumen, adaptasi terhadap transisi kepemimpinan, hingga ajakan kolaborasi lintas sektor. Keberanian untuk merumuskan program prioritas, memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, serta mulai mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pelaporan adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Kehadiran instrumen digitalisasi data, dashboard monitoring, dan forum daring

yang mulai diupayakan membuka jalan baru bagi praktik tata kelola pemerintahan yang lebih responsif. Dalam era *open government*, inovasi ini akan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang inklusif dan adaptif.

3. Dalam perjalanan menuju pembangunan ideal, beberapa catatan penting perlu menjadi refleksi Bersama, antara lain:

**a. Indikator dan Target yang Realistis dan Terfokus**

Terlalu banyak indikator kinerja memang memberi kesan lengkap, tetapi kerap menjebak birokrasi pada rutinitas administrasi tanpa substansi. Dalam dunia yang bergerak cepat, Kabupaten Malang butuh fokus pada indikator strategis, misal, pengurangan kemiskinan, kualitas pendidikan, kesehatan, dan transformasi ekonomi berbasis digital.

**b. Efisiensi dan Kolaborasi Digital**

Kebijakan pembangunan perlu menyesuaikan diri dengan prinsip efisiensi dan kolaborasi yang berbasis data digital. Teknologi informasi harus menjadi tulang punggung untuk mengurangi pemborosan anggaran, mempercepat pelayanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap program pemerintah. Kabupaten Malang dapat mengadopsi sistem *smart governance* mengoptimalkan aplikasi layanan publik, e-budgeting, hingga integrasi data antar-perangkat daerah.

**c. Intensitas Pengawasan Dari DPRD dan Publik**

Era digital membuka ruang bagi pengawasan lintas aktor. DPRD bukan sekadar “pengawas formal”, tapi juga harus menjadi fasilitator pengawasan publik berbasis data terbuka. Penguatan sistem monitoring berbasis aplikasi, audit digital, serta publikasi capaian kinerja secara real time akan mendorong akuntabilitas. Dewan harus proaktif melakukan evaluasi berbasis data dan membuka forum konsultasi daring agar suara publik benar-benar terwadahi .

**d. Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Pengawasan dan Partisipasi**

Transparansi bukan sekadar slogan, melainkan hak dasar warga. Informasi rencana, pelaksanaan, hingga capaian pembangunan wajib terbuka dan mudah diakses. Hal ini akan mencegah praktik korupsi, mengurangi disparitas, dan mendorong tumbuhnya kepercayaan publik. Keterbukaan informasi

memperkuat kolaborasi, inovasi, sekaligus menjadi alat koreksi bagi kebijakan yang belum tepat sasaran.

**Saudara Ketua, Rapat Paripurna Dewan dan hadirin sekalian yang terhormat;**

Demikian penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang, dengan harapan menjadi pertimbangan dalam pengambilan Keputusan DPRD yang selanjutnya dijadikan dasar persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Malang, kami selaku juru bicara mohon ma'af apabila selama penyampaian ada yang kurang berkenan dan Semoga apa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi DPRD, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Malang.

Sebelum menutup penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus kami sampaikan bahwa RPJMD Kabupaten Malang adalah peta jalan menuju "Malang MakmurBerkelanjutan". Namun, tanpa keberanian beradaptasi, refleksi kritis, dan partisipasi aktif seluruh warga, dokumen ini mudah kehilangan makna. Pembangunan sejatinya adalah ruang belajar bersama, di mana teknologi, transparansi, dan pengawasan menjadi jembatan antara harapan dan kenyataan. Oleh karenanya, pastikan bahwa pembangunan tidak sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga peradaban. Bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan ruang untuk bermimpi bagi setiap anak Malang.

Akhir kata,  
Ihdinashiratalmustaqim,  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
PANITIA KHUSUS**

Ketua,

Juru Bicara,

**ABDUL QODIR, S.H.**

**ZULHAM AKHMAD MUBARROK**

Kepanjen, 10 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ketua

Juru Bicara,

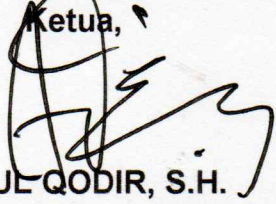
DARMADI, S.Sos



Fraksi Partai Demokrasi Indonesia  
Perjuangan


Ketua,

ABDUL QODIR, S.H.



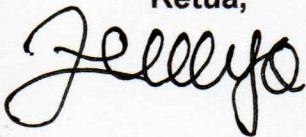
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  
Ketua,

H. ABDULLOH SATAR, S.E., M.M.



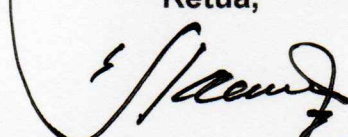
Fraksi Gerakan Indonesia Raya  
Ketua,

ZIA'UL HAQ, S.Sos., M.A.P.



Fraksi Partai Golongan Karya  
Ketua,

Ir. SUDJONO, M.P.



Fraksi Partai Nasional Demokrat  
Ketua,

AMARTA FAZA, S.T. M.Sos



Fraksi PKS HANURA DEMOKRAT  
Ketua,

SYAIFUL ROSYID, S.E., M.Si.

